

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

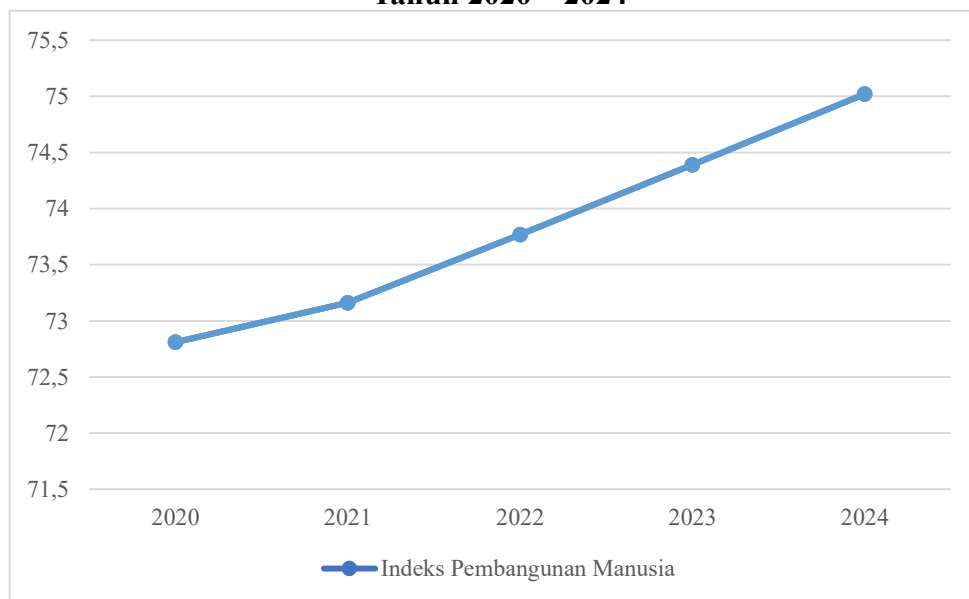
### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peran perkembangan pembangunan manusia sebagai salah satu faktor utama. Dalam kondisi perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung saat ini, kualitas hidup bukan hanya dinilai dari tingginya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi terdapat dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, dapat menjangkau layanan kesehatan yang bagus dan mendapat kesempatan hidup yang lebih baik.

Ketersediaan modal manusia yang kompeten dan berdaya saing merupakan prasyarat mutlak bagi pemerintah dalam mengeksekusi berbagai agenda pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk menakar kualitas modal manusia. Peningkatan rasio tersebut sangat bergantung pada serangkaian intervensi strategis yang bertujuan untuk mengeskalasi kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Manusia sebagai aset penting bagi suatu negara, karena ketika masyarakat dapat hidup lebih panjang, sehat, dan memiliki pengetahuan yang cukup, wilayah atau negara tersebut berpeluang memperoleh tingkat produktivitas yang lebih baik (Maulana & Farhan, 2022). Kondisi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai standar hidup yang layak.

Sebuah daerah atau negara yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi biasanya memperlihatkan keberhasilan dalam pembangunan manusianya. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja, yang pada akhirnya memiliki potensi untuk mendorong peningkatan hasil produksi. Untuk memotret tingkat distribusi capaian pembangunan di berbagai strata sosial masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia lantas diterapkan sebagai indikator kunci yang sangat diandalkan.

**Gambar 1. 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2020 – 2024**



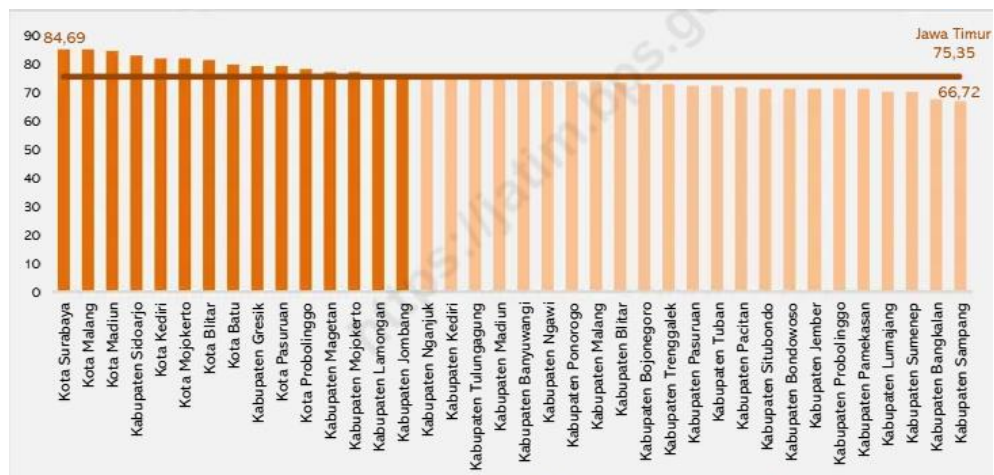
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Berdasarkan sajian grafik di atas, tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) senantiasa menunjukkan eskalasi positif selama lima periode terakhir. Pertumbuhan capaian IPM 2024 menyentuh level 0,85 persen, mengungguli rata-rata laju eskalasi rentang 2020–2023 yang tercatat sebesar 0,72 persen. Tren kenaikan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Meskipun IPM Indonesia terus meningkat, kesenjangan antardaerah tetap

nyata. Perbedaan capaian IPM di tiap provinsi masih cukup besar, sehingga peningkatan nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah.

Salah satu provinsi yang mendapat peranan penting dibidang pembangunan nasional, yaitu Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya yang cukup besar dan karena tingkat produktivitas ekonominya tinggi. Meskipun indikator pembangunan manusia di Jawa Timur secara makro terus mencatatkan progres peningkatan yang konsisten, tingkat pemerataan di setiap daerah otonom nyatanya belum optimal. Disparitas capaian ini merupakan tantangan tersendiri bagi wilayah yang menaungi 39.699.000 penduduk dan membawahi 38 wilayah kabupaten/kota di atas lahan seluas 47.800 km<sup>2</sup> tersebut.

**Gambar 1. 2. Grafik Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

secara eksplisit memotret masih tingginya disparitas capaian IPM antar daerah otonom di Jawa Timur. Fenomena ketertinggalan ini tampak menonjol pada kawasan barat daya provinsi di mana Kabupaten Madiun, Magetan,

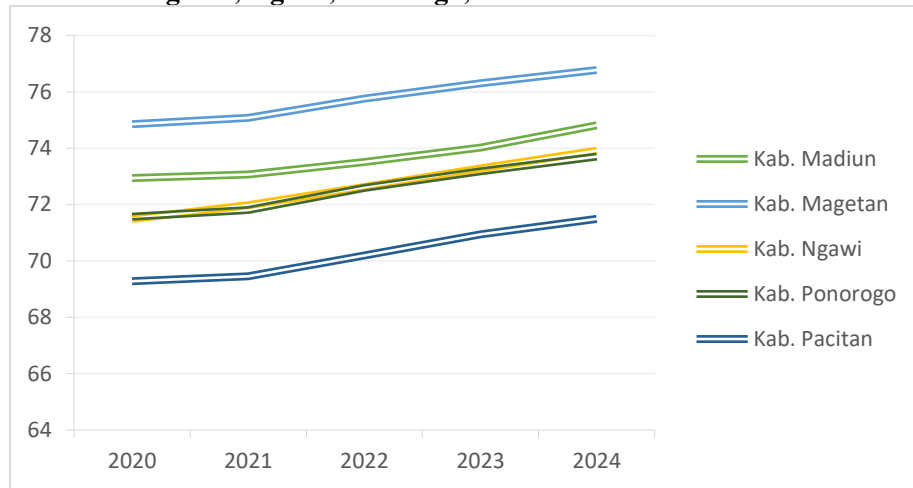
Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan yang tergabung dalam satu klaster geografis berdekatan mencatatkan perolehan IPM di bawah agregat rata-rata Jawa Timur. Kondisi yang terjadi tersebut diartikan derajat pembangunan manusia tersebut belum mencapai tingkat yang optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Kelima kabupaten berada di wilayah daratan Jawa Timur yang memiliki keterhubungan antarwilayah, akses transportasi yang relatif terbuka, serta hubungan ekonomi dan sosial yang cukup aktif dengan wilayah lain di sekitarnya. Namun demikian, capaian IPM yang dihasilkan belum mampu menyamai kinerja pembangunan manusia di wilayah daratan Jawa Timur lainnya, khususnya daerah dengan tingkat pembangunan yang maju. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan manusia yang bersifat struktural dan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis. Masih bertahannya kualitas sumber daya manusia/IPM pada jenjang menengah ke bawah merupakan tantangan riil yang saat ini dihadapi oleh kabupaten madiun, magetan, ngawi, ponorogo, pacitan. Wilayah dengan posisi tersebut memiliki urgensi untuk dikaji karena mencerminkan kondisi pembangunan manusia yang belum tertinggal secara ekstrem, tetapi juga belum mampu menunjukkan kinerja yang kuat dan berkelanjutan.

Pemilihan lima kabupaten tersebut didasarkan pada pendekatan regional, mengingat pembangunan manusia bukan hanya karena kondisi internal suatu daerah, tetapi oleh dinamika wilayah di sekitarnya. Kedekatan geografis antar kabupaten memungkinkan analisis IPM dilakukan secara lebih komprehensif dalam satu kawasan, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan

representasi yang jauh lebih utuh mengenai kondisi pembangunan manusia di wilayah barat daya Provinsi Jawa Timur.

**Gambar 1. 3. Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan Tahun 2020 – 2024**



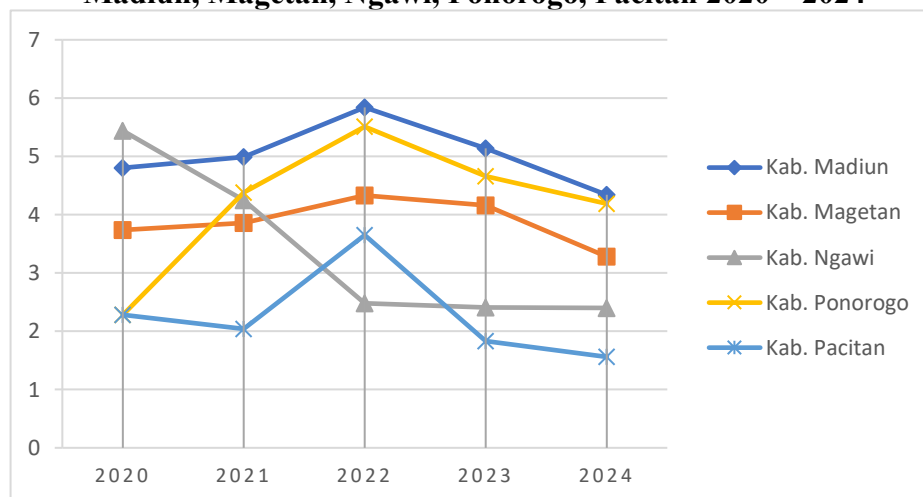
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Berdasarkan rilis data BPS Jatim periode 2020 hingga 2024, pergerakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima wilayah tersebut secara konsisten memperlihatkan eskalasi yang positif. Kabupaten Magetan secara konsisten memiliki capaian IPM tertinggi di antara kelima kabupaten, sedangkan Kabupaten Pacitan berada pada posisi terendah meskipun tetap menunjukkan perbaikan. Sementara itu, Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Ponorogo berada pada kelompok menengah dengan peningkatan IPM yang relatif stabil. Dalam pola di wilayah tersebut kualitas pembangunan manusianya mengalami kemajuan, namun masih terdapat perbedaan capaian antar kabupaten.

Belum meratanya distribusi peningkatan kualitas modal manusia secara inklusif tercermin dari masih adanya disparitas capaian antarwilayah, terlepas dari tren agregat IPM yang secara umum terus menunjukkan eskalasi. Kondisi

ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena IPM berkaitan erat dengan kemampuan penduduk dalam pengaksesan pendidikan, standar hidup yang layak juga kesehatan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi pasar kerja. Argumentasi ini sependang dengan temuan empiris Sanitra (2021), yang membuktikan bahwa variabel IPM memiliki korelasi negatif signifikan terhadap rasio pengangguran. Hubungan yang berbanding terbalik tersebut mengindikasikan bahwa eskalasi IPM akan diikuti oleh penyusutan rasio pengangguran, mengingat perbaikan kualitas modal manusia mampu mencetak angkatan kerja yang jauh lebih produktif serta berdaya saing tinggi.

**Gambar 1. 4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan 2020 – 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Data TPT dari BPS Jatim (2024), tren tersebut pada wilayah penelitian menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022, sebagian besar kabupaten mengalami peningkatan tingkat pengangguran, yang kemudian diikuti dengan penurunan pada periode 2023–2024. Kabupaten Madiun dan Ponorogo cenderung memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi dari

kabupaten yang lainnya, sementara Kabupaten Pacitan menunjukkan tingkat pengangguran yang terendah secara konsisten.

Perbedaan pola dan tingkat pengangguran antar kabupaten tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja di wilayah ini belum sepenuhnya pulih secara merata. Fluktuasi tingkat pengangguran mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan pembangunan manusia dan dinamika ekonomi di masing-masing kabupaten. Tingkat pengangguran yang tinggi pada suatu daerah umumnya dipengaruhi oleh terbatasnya peluang kerja serta rendahnya keterampilan tenaga kerjanya. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat karena banyak penduduk yang tidak dapat terserap dalam kegiatan ekonomi (Faizin, 2021).

Faktor yang mendukung pembangunan manusia tidak terbatas pada rendahnya tingkat pengangguran, tetapi juga mencakup pertumbuhan ekonomi. Peningkatan standar hidup di tengah masyarakat dapat terealisasi berkat adanya *multiplier effect* dari pertumbuhan ekonomi, yang diwujudkan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan agregat, serta optimalisasi produktivitas. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Arifin (2021), pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi signifikan kepada IPM, saat terjadi akselerasi dalam ekspansi ekonomi maka akan ada peningkatan juga dalam IPM. Ketika perekonomian suatu daerah tumbuh stabil, aktivitas produksi meningkat dan kesempatan kerja semakin luas, sehingga pendapatan

masyarakat ikut naik. Kondisi ini pada akhirnya mendorong perbaikan capaian IPM melalui membaiknya pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Intervensi pemerintah dalam merancang dan mengeksekusi agenda pembangunan merupakan prasyarat mutlak yang tidak terpisahkan dari upaya eskalasi kualitas modal manusia. Selain menyusun kebijakan, pemerintah juga memerlukan dukungan anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Literatur empiris yang disusun oleh Sutono (2022) telah membuktikan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan progres IPM. Relasi kausalitas ini pada dasarnya terbentuk dari penyaluran dana publik yang difokuskan pada sektor esensial seperti Kesehatan dan Pendidikan sebagai basis modal manusia. Melalui efisiensi serapan anggaran di kedua sektor tersebut, taraf kesejahteraan masyarakat dapat terakselerasi yang pada gilirannya terefleksikan melalui tren perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini bersandar pada paradigma pembangunan manusia yang menolak asumsi bahwa rasio pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan. Ketercapaian pembangunan sejatinya harus ditinjau dari kapabilitas masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan standar hidup yang memadai. Atas dasar tersebut, IPM diimplementasikan sebagai parameter komprehensif guna memotret realitas kualitas hidup masyarakat secara utuh.

Pada wilayah penelitian perkembangan pembangunan manusia menunjukkan keterkaitan dengan beberapa aspek penting, seperti kondisi

ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengeluaran pemerintah. Tingkat pengangguran mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, sedangkan pertumbuhan ekonomi menggambarkan berlangsungnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran melalui pengalokasian belanja publik untuk mendukung program-program pembangunan guna mengakselerasi perbaikan taraf hidup masyarakat.

Di satu sisi, belanja pemerintah daerah berperan dalam mendukung peningkatan derajat pembangunan manusia melalui penyediaan layanan publik, terkhusus dibidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Namun, perbedaan capaian IPM dan dinamika pengangguran di lima kabupaten tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak selalu terjadi secara merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah terhadap IPM perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami sejauh mana ketiga faktor tersebut memberi kontribusi pada kenaikan pembangunan manusia di wilayah yang diteliti.

Mayoritas penelitian empiris sebelumnya terkait IPM masih didominasi oleh kajian pada tingkat nasional dan provinsi, dengan fokus pada gambaran pembangunan manusia secara umum. Sementara itu, kajian yang menganalisis IPM pada tingkat kabupaten secara regional masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji keterkaitan antara tingkat pengangguran dan belanja pemerintah terhadap pembangunan manusia secara simultan. Padahal, perbedaan capaian IPM dan dinamika pengangguran antar kabupaten yang

berdekatan menunjukkan bahwa pembangunan manusia pada level daerah tidak selalu berjalan secara seragam.

Keterbatasan kajian pada tingkat kabupaten tersebut menciptakan celah penelitian dalam memahami bagaimana faktor-faktor pembangunan memengaruhi IPM pada wilayah dengan keterkaitan geografis namun menghasilkan capaian pembangunan manusia yang berbeda. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan dalam satu analisis. Pendekatan ini diestimasikan dapat memberikan penafsiran yang lebih presisi perihal perbedaan kondisi pembangunan manusia antarwilayah serta faktor-faktor yang memengaruhinya selama periode penelitian.

Berangkat dari hal tersebut, studi empiris ini mengusung judul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan”** menjadi penting bukan hanya dari sisi teoritis karena memperkaya literatur tentang determinan pembangunan manusia di tingkat daerah tetapi juga dari sisi empiris, karena memberikan bukti terbaru yang relevan mengenai dinamika pembangunan manusia di wilayah penelitian.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan?
3. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna mengidentifikasi dinamika pembangunan dan faktor pengubahnya secara historis, penelitian ini menggunakan data kurun waktu 2015 hingga 2024. Adapun batas observasi geografisnya difokuskan pada wilayah Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan dengan mengandalkan rilis data valid dari instansi otoritatif semacam Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara metodologis, analisis ini menempatkan IPM sebagai variabel dependen, untuk kemudian diukur tingkat signifikansinya terhadap variabel independen yang meliputi tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, serta belanja pemerintah.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun sebuah telaah empiris terkait sejauh mana determinan ekonomi mentransmisikan pengaruhnya terhadap kualitas pembangunan manusia di kawasan penelitian. Hasil yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan penelitian lain yang membahas isu pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diestimasikan mampu menyuguhkan perspektif yang lebih mendalam perihal kausalitas antara kondisi pasar kerja, pertumbuhan ekonomi,

dan intervensi fiskal daerah terhadap eskalasi sumber daya manusia di wilayah penelitian. Temuan tersebut dapat dioptimalkan oleh otoritas daerah sebagai rujukan utama dalam menyusun kerangka kebijakan yang lebih efektif, terutama guna mengurai problematika ketenagakerjaan dan mengakselerasi kualitas hidup masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diestimasikan dapat mempertegas pemahaman akademis seputar keterkaitan langsung antara indikator ekonomi makro dan dimensi kualitas hidup masyarakat. Melalui informasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan.

c) Bagi Kampus atau Institusi Pendidikan

Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi keilmuan, di mana diharapkan mampu menjadi landasan studi pustaka dan pijakan referensi bagi sivitas akademika yang sedang merampungkan riset akhir dengan fokus bahasan sejenis.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini urut berpotensi menjadi pijakan dasar kedepannya guna mengkaji faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia. Pengembangan penelitian dapat dilakukan melalui perluasan objek penelitian, penambahan indikator lain, atau penggunaan metode analisis yang berbeda sesuai kebutuhan penelitian.